

Pengaruh *Financial Expertise of Committee Audit Members*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan

(Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang *Listed (Go Public)*

di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2002-2006)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**WIDYA NUR ANISA
NIM. C2C008148**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Widya Nur Anisa

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 008 148

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH *FINANCIAL EXPERTISE of COMMITTEE AUDIT MEMBER, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, UKURAN PERUSAHAAN dan LEVERAGE TERHADAP TERJADINYA KECURANGAN PELAPORAN KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang *Listed (GoPublic)* di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2002-2006)***

Dosen Pembimbing : Andri Prastiwi, SE,Msi,Akt

Semarang, 22 Februari 2012
Dosen Pembimbing

Andri Prastiwi SE,Msi,Akt
NIP. 19670814 199802 200

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Widya Nur Anisa
Nomor Induk Mahasiswa : C2C 008 148
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **Pengaruh *Financial Expertise of Committee Audit Members*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan-Perusahaan yang *Listed (GoPublic)* di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2002-2006)**
Dosen Pembimbing : Andri Prastiwi, SE., Msi., Akt.

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 6 Maret 2012.

Tim Penguji :

1. Andri Prastiwi SE.,Msi.,Akt. (.....)
2. Puji Harto Msi., PhD., Akt (.....)
3. Dra. Zulaikha Msi., Akt, (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Widya Nur Anisa, menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pengaruh *Financial Expertise of Committee Audit Member*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulisan aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 22 Februari 2012

Yang Membuat Pernyataan

Widya Nur Anisa
NIM. C2C 008 148

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Life's too short to have regrets, so I'm learning to now to leave it in the past and try to forget, We Only Have One Life to Live, so you better make the best of it

(Bruno Mars)

To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe.

(Anatole France)

Karya ini ku persembahkan untuk :

Bapak ,Ibu dan Keluarga besarku

Iccha Wirayodha

Sahabat-sahabat ku

Dan untuk orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan

ABSTRACT

This research aims to find empirical evidence of factors influencing Fraudulent financial reporting. The factors to be analysed in this research namely financial expertise of Audit Committee, managerial ownership, size company, and leverage.

This research used secondary data on companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2002-2006. Data companies that commit fraudulent financial reporting was collected using purposive sampling. Furthermore, this study also used the paired samples (matched-pairs sample) among the companies that make financial reporting fraud to a company that does not make financial reporting fraud. The number of samples in this study were 76 companies with details of 38 companies that make fraudulent financial reporting and 38 others are companies that do not commit fraud. Statistical data analysis method used is logistic regression.

These results show that audit committee expertise is significant negatively affected by the occurrence of fraudulent financial reporting. Leverage also showed a positive and significant impact on financial reporting fraud. Meanwhile, two other factors; managerial ownership and firm size does not affect the occurrence of fraudulent financial reporting

Keywords : fraudulent financial reporting, financial expertise of committee audit, managerial ownership, size, and leverage

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah keahlian keuangan komite audit, kepemilikan saham manajerial, ukuran perusahaan, dan tingkat *leverage*.

Penelitian ini menggunakan data sekunder pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2002-2006. Data perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dikumpulkan dengan menggunakan *purposive sampling*. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan *paired sample (matched-pairs sample)* antara perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 76 perusahaan dengan rincian 38 perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dan 38 lainnya adalah perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Metode analisis data statistik yang digunakan adalah regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit secara signifikan berpengaruh negatif dengan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. *Leverage* juga menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan dua faktor lain yaitu kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

Kata Kunci : kecurangan pelaporan keuangan, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul Pengaruh *Financial Expertise of Committee Audit Member*, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang besar terhadap pihak-pihak yang telah membantu baik dukungan, doa, dan cinta baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua Orangtua ku; Bapak Sono Prabowo dan Ibu Sutipah. Terimakasih untuk semua doa, nasehat, dan dukungannya selama ini. Mungkin aku tidak bisa membalas satu per satu apa yang Bapak dan Ibu beri, tapi aku selalu berusaha untuk membuat Bapak dan Ibu bahagia.
2. Kakak-kakak ku Citra Wulandhona, Setio Ari Wibowo, dan Yani Rumastuti, Terimakasih untuk dukungannya selama ini. Dan tak lupa si kembar M. Mirza Pahlevi dan M. Rizqi Fachrezi, terimakasih telah membuatku selalu terhibur. Semoga Iza ama Ezi cepet gede yaa..
3. Ibu Andri Prastiwi selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, dukungan, dan waktu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Terimakasih ya ibu untuk bimbingannya dan kesabarannya menghadapi saya, semoga Ibu sukses dan bahagia selalu. Amin

4. Bapak Dwi Cahyo Utomo SE,Msi,Akt dan Bapak Puji Harto SE,Msi,Akt selaku dosen wali yang telah memberi saran dan membantu selama perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis
5. Bapak Prof. Drs. H. Muhammad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
6. Bapak Prof. Dr. H.M. Syafruddin Msi,Akt selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro atas semua ilmu yang telah diberikan.
8. Teman-teman #G2K2; Amelinda Devina, Dyas Tri Pamungkas, Hana Puji Lestari, Kumala Sari, Widiyastuti, Intan Kamalasari, Dini Fitriani, Siti Kurniati terimakasih telah menjadi keluarga baru ku. Susah dan senang telah kita lalui bersama. Semoga kita sukses selalu ya kawan. Dan jangan lupa janji kita untuk menonton *Breaking Dawn Part II* bersama-sama yaaaaaa... Aku akan sangat merindukan kalian.
9. Iccha Wirayodha. Terimakasih untuk dukungannya, untuk cerita-ceritanya, kesediaannya untuk tempat berbagi tangis dan tawa, untuk SPSS nya, dan untuk semuanya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita mu yaaa. Fighting!
10. Teman-teman akuntansi 2008. Senang menjadi bagian dari keluarga ini. Semoga kita semua sukses selalu yaa..

11. UPK FEB *Crew*. Terimakasih buat koneksi internetnya yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini. Jaya selalu UPK FEB!
12. Teman-teman KKN Tim II Kec.Kaliwungu Kudus Desa Mijen; Mas Septian Dwi Wicaksono, Bayu Kurniawan, Ikanita Novirina, Selma Noor Permadi, Ika Dewi Prasati dan Erva Maulita. Latar belakang yang berbeda ternyata dapat menyatukan kita. Terimakasih untuk 35 hari yang penuh cerita.
13. Teman-teman Kos Siwungu 9. Terimakasih untuk kesediaannya berbagi cerita.
14. Semua pihak-pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang diberikan. Semoga Allah melimpahkan berkah dan rahmatNya bagi bapak, ibu dan saudara yang telah berbuat baik untuk saya. Dalam hal ini, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 22 Februari 2012

Widya Nur Anisa

NIM. C2C 008 148

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Teori Agensi.....	11
2.1.2 Komite Audit	13
2.1.2.1 Pengertian Komite Audit	12
2.1.2.2 Tugas Komite Audit	14
2.1.2.3 Wewenang Komite Audit Independen	15
2.1.2.4 Komite Audit di Indonesia	16
2.1.2.5 Kepemilikan Manajerial	19
2.1.3 Fraud atau Kecurangan.....	19

	2.1.3.1 Pengertian Fraud atau Kecurangan.....	19
	2.1.3.2 Jenis-jenis Fraud atau Kecurangan.....	20
	2.1.3.3 Faktor Penyebab terjadinya Kecurangan.....	22
	2.1.3.4 Pelaku Kecurangan.....	24
	2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
	2.3 Kerangka Pemikiran	30
	2.4 Hipotesis	31
	2.4.1 Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit dengan Terjadinya <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	31
	2.4.2 Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan Terjadinya <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	33
	2.4.3 Hubungan Antara Ukuran Perusahaan dengan Terjadinya <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	34
	2.4.4 Hubungan Antara <i>Leverage</i> dengan Terjadinya <i>Fraudulent Financial Reporting</i>	34
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
	3.1.1 Variabel Terikat.....	36
	3.1.2 Variabel Bebas	36
	3.2 Populasi dan Sampel	37
	3.3 Jenis dan Sumber Data	39
	3.4 Metode Pengumpulan Data	39
	3.5 Metode Analisis.....	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
	4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	45
	4.1.1 Pemilihan Sampel berdasarkan Jenis Industri	46
	4.1.2 Pemilihan Sampel berdasarkan tahun.....	47
	4.2 Hasil Uji Multikolinearitas	47
	4.3 Hasil Analisis Deskriptif	49

	4.4 Hasil Uji Hipotesis	50
	4.4.1 Hasil Pengujian <i>Overall Model Fit</i>	50
	4.4.2 Hasil Menilai Kelayakan Model Regresi	51
	4.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi	51
	4.5 Pembahasan	53
BAB V	PENUTUP	
	5.1 Kesimpulan.....	58
	5.2 Keterbatasan Penelitian	59
	5.3 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 27
Tabel 4.1	Jumlah Perusahaan yang Mengalami Kecurangan Pelaporan Keuangan..... 45
Tabel 4.2	Perusahaan yang Mengalami Kecurangan dan Tidak Mengalami Kecurangan (Berdasarkan Jenis Industri)..... 46
Tabel 4.3	Perusahaan yang Mengalami Kecurangan dan Tidak Mengalami Kecurangan (Berdasarkan Tahun)..... 47
Tabel 4.4	Hasil Uji <i>Multikolinearitas</i> 47
Tabel 4.5	Hasil <i>Descriptive Statistic</i> Objek Penelitian 49
Tabel 4.6	Hasil Pengujian <i>Overall Model Fit</i> 50
Tabel 4.7	Hasil Menilai Kelayakan Model Regresi 51
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi 51
Tabel 4.9	Hasil Regresi Logistik 52
Tabel 5.0	Ringkasan Hasil Penelitian..... 57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Model Pemikiran	31

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Perusahaan yang Dijadikan Sampel Penelitian.....	63
Lampiran B Hasil Output SPSS.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud atau kecurangan sering terjadi pada negara-negara berkembang. Indonesia sendiri, masih tergolong negara dengan tingkat korupsi yang tinggi di dunia. Menurut Transparansi International, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sebesar 2,3 dan berada di urutan 143 dari 180 yang diamati (Wilopo, 2006)

Berdasarkan survei terbaru di United Kingdom mengindikasikan bahwa kerugian dari kecurangan yang dilakukan oleh karyawan pada perusahaan yang terdaftar saja berjumlah £2 milyar setahun (Management Issues News, 2005 dalam Rae & Subramaniam, 2008). Pada 2004, KPMG Australia dan Selandia Baru melakukan studi terhadap 491 bisnis besar dan memperlihatkan bahwa terjadi 27.657 peristiwa kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dalam dua tahun mulai dari April 2002 sampai Maret 2004, dengan total kerugian berjumlah A\$ 456.7 juta (KPMG Forensic, 2004). Studi tersebut juga menyatakan bermacam-macam aktivitas kecurangan, yaitu kecurangan pernyataan keuangan, penyalahgunaan aset, pencurian informasi dan menerima suap. Lebih lanjut, pelaku utama dari kecurangan tersebut telah diketahui yaitu karyawan, dan hampir 67% kecurangan seperti itu dilakukan pada tingkat manajemen.

Di awal tahun 2002, publik dikejutkan dengan adanya kasus kecurangan oleh PT Kimia Farma Tbk. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan

tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar (Parsaroan, 2009).

Kasus kecurangan juga terjadi di sektor perbankan yaitu kasus dana talangan Bank Century. Bank Century adalah hasil dari *merger* tiga bank yaitu Bank CIC, Bank Piko, dan Bank Danpac di tahun 2004. Setelah dua bulan *merger*, rasio kecukupan modal Bank Century menjadi negatif 132.5 %. Dalam kondisi ini, Bank Indonesia menetapkan Century sebagai bank dalam pengawasan khusus, namun BI hanya memberi kategori bank dalam pengawasan intensif, dimana Bank Century mempunyai masalah surat berharga dan perkreditan yang berpotensi menimbulkan kesulitan keuangan. Selanjutnya, di tahun 2005 Bank Indonesia menemukan bukti bahwa Century melakukan pelanggaran batas maksimum pemberian kredit. Dalam perjalanannya, Century mengalami kalah kliring atau tidak bisa membayar dana permintaan nasabah dan akhirnya Century

mengajukan fasilitas pendanaan darurat dengan alasan sulit untuk mendapatkan dana. Di tahun 2008, Robert Tantular selaku komisaris utama ditahan Kepolisian karena diduga telah mempengaruhi kebijakan direksi yang mengakibatkan Bank Century gagal kliring. Akhirnya, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta untuk mengaudit Century di tahun 2009. Dan ditahun itu juga, Direktur Utama Bank Century divonis tiga tahun penjara karena terbukti menggelapkan dana nasabah.

Namun demikian sebenarnya telah diambil langkah-langkah untuk menekan tingkat kecurangan pelaporan keuangan. Pada tahun 1999, Blue Ribbon Company (BRC) menyarankan sebaiknya perusahaan publik memiliki komite audit independen dan setidaknya terdapat satu orang yang menjadi ahli keuangan dalam komite tersebut (Owen-Jackson *et al*, 2009). Di tahun yang sama, peraturan tersebut diberlakukan pada perusahaan yang *listing* di New York Exchange dan National Association of Exchange Dealers. Setelah terbongkarnya kasus Enron, maka muncullah Sarbanes-Oxley Act sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan investor. Sarbanes-Oxley Act memerintahkan bahwa komite audit harus sepenuhnya independen dan memiliki setidaknya satu orang yang ahli dalam bidang keuangan. Selain itu, Sarbanes-Oxley Act juga menambahkan tugas baru kepada komite audit untuk bertanggung jawab secara langsung untuk menunjuk, memberikan kompensasi serta mengawasi auditor eksternal (Owen-Jackson *et al*, 2009).

Penelitian terdahulu mengenai komposisi komite audit dan aktivitas dalam proses kontrak sangatlah terbatas dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda (Menon dan Williams, 1994 dalam Owen-Jackson *et al*, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Abbot *et al* (2004) menghasilkan kesimpulan bahwa Independensi komite audit, tingkat aktivitas, dan keahlian keuangan (setidaknya satu anggota dengan ahli keuangan) menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan dengan hubungan terjadinya penyajian kembali atau *restatement*. Bedard *et al.* (2004) menemukan manajemen yang agresif laba memiliki hubungan yang negatif terkait dengan anggota komite audit yang ahli keuangan dan *governance expertise*, dengan independensi, dan dengan kehadiran mandat yang jelas yang mendefinisikan tanggung jawab komite (Owen-Jackson *et al* 2009). Disisi lain, hasil penelitian tidak menemukan perbedaan antara perusahaan yang membentuk dan tidak membentuk komite audit (Beasley 1996, Kalbers 1992, Crowford 1987 dalam Suaryana,2005).

Law (2010) meneliti mengenai *fraudulent financial reporting* di Hongkong. Dalam penelitian ini, kecurangan dilihat dari sisi ke-efektifan komite audit, pengendalian internal perusahaan, *tone at the top management level*, laporan audit tahun lalu, kebijakan perusahaan mengenai karyawan, pemakaian auditor *external* dalam perusahaan, dan pemakaian KAP *Big Four* dalam perusahaan. Dari penelitian ini didapat hasil bahwa ke-efektifan komite audit, pengendalian internal perusahaan, *the tone at the top managerial level* dan kebijakan perusahaan mengenai karyawan memiliki hubungan yang positif dengan tidak terjadinya kecurangan. Sedangkan pemakaian auditor *external* maupun pemakaian KAP *Big Four* dan laporan audit tahun lalu tidak memiliki pengaruh dengan terjadinya *fraud*.

Smieliauskas (2005) juga melakukan penelitian kualitatif mengenai *fraud*. Penelitian ini meneliti hubungan antara penelitian resiko *fraud* dengan resiko lain oleh auditor. *Problem area* dalam penelitian ini adalah PCAOB (*Publik Accounting Oversight Board*). Hasil dari penelitian ini antara lain adalah terjadi peran penting *benchmarks* dalam akuntansi forensik untuk membantu membedakan antara salah saji yang disengaja maupun tidak disengaja. Hasil yang kedua adalah pentingnya aturan untuk menilai resiko terjadinya *fraud*.

Namun dari sekian banyak penelitian yang telah dilakukan, hanya sedikit peneliti yang mengaitkan *fraudulent financial reporting* dengan proses kontrak. Di tahun 2009, Owen-Jackson *et al* melakukan penelitian mengenai hubungan antara karakteristik komite audit dan proses kontrak. Yang menarik dalam penelitian ini adalah digunakannya karakteristik komite audit independen menurut Sarbones Oxley 2002 dan ukuran perusahaan serta melihat *processing contract* yang dilihat dari kepemilikan manajerial dan *leverage*. Dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan (*size*) secara signifikan mempengaruhi terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dimana anggota dari komite audit harus memiliki keahlian mengenai *financial*. Selain itu, komite audit independen juga memiliki tugas baru yakni menunjuk, kompensasi, dan mengawasi auditor eksternal.

Di Indonesia sendiri, penelitian mengenai kecurangan pelaporan keuangan masih terbatas. Jika ada, penelitian tersebut tidak dihubungkan dengan proses kontrak dan biasanya hanya artikel yang menjelaskan mengenai kecurangan. Koroy (2008) menulis sebuah jurnal mengenai pendeteksian

kecurangan (*Fraud*). Jurnal ini berisi mengenai pendeteksian *fraud* oleh auditor eksternal. Didapat empat faktor penyebab yang diidentifikasi melalui makalah ini. Pertama adalah karakteristik terjadinya kecurangan sehingga menyulitkan proses pendeteksian. Kedua, standar pengauditan belum cukup memadai untuk menunjang pendeteksian yang sepatasnya. Ketiga, lingkungan kerja audit dapat mengurangi kualitas audit dan keempat, prosedur audit yang ada tidak cukup efektif untuk melakukan pendeteksian kecurangan.

Keahlian keuangan komite audit sangat berguna bagi perusahaan. Jika anggota Komite Audit seorang yang ahli dalam bidang keuangan, setidaknya dia mengerti betul mengenai akuntansi. Selain itu, dengan memiliki ahli keuangan dalam komite audit, dapat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian mengenai kecurangan yang kaitannya dengan karakteristik komite audit dan proses kontrak masih sedikit dilakukan. Owen-Jackson *et al* (2009) meneliti hubungan antara kecurangan dengan karakteristik komite audit, proses kontrak serta ukuran perusahaan. Karakteristik komite audit disini dilihat dari keahlian keuangan yang dimiliki anggota komite audit. *Blue Ribbon Community* memberikan saran bahwa setidaknya ada satu anggota komite audit yang memiliki latar belakang keuangan. Hal ini dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Tak hanya itu, *Sarbone Oxley* juga memberikan persyaratan khusus untuk keanggotaan komite audit. Salah seorang anggota komite audit setidaknya memiliki pengalaman atau keahlian di bidang keuangan. Selain itu, komite audit juga memiliki

tanggungjawab baru yakni menunjuk, memberikan kompensasi, dan mengawasi auditor eksternal.

Selain itu, Owen-Jackson (2009) juga memperhatikan apakah proses kontrak mempengaruhi terjadinya sebuah kecurangan dalam pelaporan keuangan. Proses kontrak disini dilihat dari *leverage* dan kepemilikan saham manajerial. *Leverage* menunjukkan kontrak perusahaan dengan pihak ketiga. Sedangkan kepemilikan manajerial menunjukkan kontrak dengan manajer. Sedangkan ukuran perusahaan juga diperhatikan dalam penelitian ini. Fama-Jensen (1983) mengatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan *agency cost* yang semakin tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar biaya untuk memonitoring perusahaan. Monitoring ini diharapkan dapat menekan tingkat asimetri informasi antara agen dan *principal*.

Di Indonesia, penelitian tentang kecurangan pelaporan keuangan masih jarang dilakukan. Dan penelitian mengenai *fraud* dan karakteristik komite audit, proses kontrak serta ukuran perusahaan sepertinya belum pernah dilakukan. Artikel-artikel mengenai *fraudulent* biasanya hanyalah sebatas penjelasan saja. Misalnya saja Koroy (2008) memberikan pendapat bahwa terdapat empat akibat kegagalan identifikasi *fraud* oleh auditor eksternal, pertama adalah karakteristik terjadinya kecurangan sehingga menyulitkan proses pendeteksian, kedua, standar pengauditan belum cukup memadai untuk menunjang pendeteksian yang sepatutnya. ketiga lingkungan kerja audit dapat mengurangi kualitas audit dan keempat, prosedur audit yang ada tidak cukup efektif untuk melakukan

pendeteksian kecurangan. Oleh karena itu, rumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Apakah keahlian komite audit independen mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan di dalam sebuah perusahaan?
2. Apakah kepemilikan saham oleh manajerial mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan di dalam sebuah perusahaan?
3. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan?
4. Apakah *leverage* mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberi dukungan secara empiris mengenai pengaruh komite audit independen terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
2. Untuk memberi bukti empiris mengenai kepemilikan saham manajerial terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
3. Untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh *leverage* terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.
4. Untuk memberi bukti empiris mengenai pengaruh *size* terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan dengan memperhatikan komite audit independen, *size*, kepemilikan manajerial, serta *leverage*.
2. Memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan pelaporan keuangan, sehingga diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat lebih berkomitmen dalam memperbaiki tatanan internal perusahaan.
3. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* yang dilihat dari komite audit, *size*, serta proses kontrak (*leverage* dan kepemilikan manajerial) yang sebelumnya terfokus pada negara maju dan jarang diteliti di Indonesia
4. Bagi investor, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan berinvestasi pada perusahaan yang memiliki kinerja dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai isi skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab. Bab I yakni mengenai Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran mengenai faktor-faktor yang disinyalir dapat mempengaruhi praktik terjadinya kecurangan

pelaporan keuangan, rumusan masalah sebagai sesuatu yang diangkat untuk diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini dan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, manfaat penelitian yang diharapkan akan didapat dari penelitian ini, dan sistematika penulisan skripsi. Selanjutnya adalah bab II. Pada bab ini diuraikan mengenai teori dan konsep yang melandasi topik permasalahan penulisan skripsi ini. Selain itu bab ini juga mengemukakan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya. Dan pada akhir bab ini diberikan perumusan hipotesis awal dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian. Di bab III berisi mengenai penjelasan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, obyek penelitian, rancangan penelitian, jenis dan sumber data, ruang lingkup penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. Pada bab IV berisi tentang deskripsi obyek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil yang didasarkan pada hasil analisis data. Selanjutnya pada bab terakhir yaitu bab V berisi kesimpulan penelitian. Disamping itu juga dijelaskan mengenai keterbatasan penelitian dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) memperkenalkan tentang teori keagenan. Teori *agency* berkaitan dengan hubungan antara *principal* dan agen, dimana yang dimaksud *principal* adalah pemilik perusahaan dan yang dimaksud *agency* adalah orang yang didelegasikan untuk menjalankan usaha. Agen lebih menguasai informasi perusahaan dibandingkan dengan pihak *principal*. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan pihak agen.

Teori agensi menunjukkan pentingnya pemisahan antara manajemen perusahaan dan hubungan pemilik kepada manajer. Tujuan pemisahan ini adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dengan menyewa pihak yang profesional untuk mengelola perusahaan. Namun pemisahan ini ternyata menimbulkan permasalahan. Permasalahan muncul ketika terjadi ketidaksamaan tujuan antara *principal* dan agen.

Teori *agency* menganggap bahwa individu berperilaku sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Hendriksen (1992 dalam Septiani, 2005) menyatakan bahwa agen memiliki kontrak untuk menunjukkan kewajibannya kepada *principal*, sedangkan *principal* memiliki kontrak untuk memberikan bonus kepada agen. Para *principal* menginginkan keuntungan yang besar dari

perusahaan agar investasi yang telah ditanamkan cepat kembali. Namun disisi lain, para *agency* pun memiliki kepentingan sendiri yakni bonus yang diterima.

Principal menilai kinerja agen berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan laba sebesar mungkin yang nantinya berpengaruh terhadap besarnya deviden yang dibagi. Makin tinggi laba, harga saham akan semakin naik, begitu pula dengan deviden yang akan dibagi. Keadaan seperti inilah yang membuat bonus para *agency* menjadi berlipat ganda.

Eisenhardt (1989) menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*. Yang dimaksud *opportunistic* disini adalah bahwa manajer akan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya.

Antara agen dan *principal* memiliki tujuan masing-masing. *Principal* ingin mendapatkan pengembalian investasi yang tinggi, di lain pihak para agen pun ingin mendapatkan kompensasi yang besar dari hasil kerjanya. Perbedaan tujuan itulah yang mengakibatkan terjadinya *conflict of interest* diantara pihak agen dan *principal*. Hal inilah yang mendorong terjadinya asimetri informasi diantara kedua belah pihak tersebut. Karena agen menginginkan kompensasi yang tinggi, maka kemungkinan besar akan terjadi *moral hazard* oleh para agen. Apalagi para agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan para

principal. Hal ini yang menimbulkan kesempatan (*opportunistic*) agen untuk melakukan kecurangan.

Kurangnya informasi *principal* mengenai kinerja agen menyebabkan ketidakseimbangan informasi diantara keduanya. Hal inilah yang menjadi celah para agen untuk melakukan kecurangan.

2.1.2 Komite Audit

2.1.2.1 Pengertian Komite Audit

Komite audit independen menjadi bahan perbincangan ketika terjadi beberapa kasus akuntansi beberapa tahun yang lalu. Perusahaan yang mengalami permasalahan akuntansi diduga tidak memiliki sebuah tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu Komite audit independen pada perusahaan bisa menjadi salah satu bentuk dari *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Keputusan Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Dalam hal ini,keberadaan komite audit adalah untuk membantu tugas-tugas dari dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan.

Selain itu, menurut Arrens & Loebbecke (2000 dalam Effendi,2005) yang dimaksud dengan Komite Audit adalah sebagai berikut:

An audit committee is a selected number of members of company board of directors whose responsibilities include helping auditors remain independen of management. Most audit

committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not part of company management.

2.1.2.2 Tugas Komite Audit

Menurut Keputusan Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit tugas Komite Audit Independen adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal
4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik
6. Menjaga kerahasiaan dokumen,data dan informasi perusahaan.

Komite Audit dapat menjadi indikator baik-buruknya tata kelola sebuah perusahaan (*good corporate governance*). Rendahnya *corporate governance* juga menyebabkan terjadinya beberapa kecurangan di dalam perusahaan. Bahkan faktor pemicu terjadinya krisis di tahun 1997-1999 adalah rendahnya tingkat *corporate governance*. Oleh karena itu pada tahun 1999 pemerintah membentuk

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat *corporate governance*.

Dengan adanya tata kelola yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang nantinya juga akan berpengaruh dengan informasi yang dihasilkan. Dengan dihasilkan informasi yang baik, maka akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh investor.

2.1.2.3 Wewenang Komite Audit

Dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, komite audit independen memiliki wewenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit bekerja sama dengan pihak yang berkaitan dengan fungsi internal audit dan staf keuangan perusahaan. Komite audit akan melakukan *review* terhadap laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan pengungkapan dan isi yang telah diaudit oleh akuntan publik, melakukan *review* mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntansi, hal-hal serta penilaian signifikan lainnya yang terdapat pada laporan keuangan, independensi dan obyektifitas dari akuntan publik. Selain itu, juga dilaksanakan rencana audit internal, profil resiko, penerapan pengelolaan resiko, pendekatan audit berdasarkan penerapan pengelolaan resiko, kecukupan dari sistem pengendalian intern dan temuan audit beserta tindak lanjutnya serta rekomendasi lain yang diberikan oleh pengawas kebijakan, akuntan publik serta pihak terkait lainnya.

Di setiap akhir pelaksanaan tugas, komite audit diharuskan untuk membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada Dewan Komisaris perusahaan. Laporan Komite Audit Independen berisi tentang simpulan tugas yang telah dilakukan selama satu periode atau satu tahun berjalan termasuk *review* laporan keuangan serta hal-hal terkait pengendalian internal perusahaan.

2.1.2.4 Komite Audit di Indonesia

Komite Audit mulai dibentuk sejak terjadinya skandal beberapa perusahaan. Komite Audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya Komite Audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula. Di Indonesia terdapat tiga karakteristik komite audit, yaitu Komite Audit bidang perbankan, Komite Audit BUMN dan Komite Audit Perusahaan Publik.

Untuk Komite Audit perusahaan publik tercantum dalam Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12-2001 perihal keanggotaan komite audit pada Desember 2001. Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa :

- a. Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya tiga orang, termasuk Ketua Komite audit.
- b. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris tersebut

harus merupakan Komisaris Independen Perusahaan Tercatat yang sekaligus menjadi Ketua Komite audit.

- c. Anggota lainnya dari Komite Audit adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Yang dimaksud pihak eksternal adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang bukan merupakan komisaris, direksi dan karyawan Perusahaan Tercatat, sedangkan yang dimaksud independen adalah pihak diluar Perusahaan Tercatat yang tidak memiliki hubungan usaha dan hubungan afiliasi dengan Perusahaan Tercatat, komisaris, direksi dan Pemegang Saham Utama Perusahaan Tercatat dan mampu memberikan pendapat profesional secara bebas sesuai dengan etika profesionalnya, tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Ketentuan mengenai komite audit juga diatur dalam Surat Edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 tertanggal 05 Mei 2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 antara lain diatur sebagai berikut :

1. Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen Perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti, laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
- b. independensi dan objektivitas akuntan publik,
- c. melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang penting telah dipertimbangkan,
- d. melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan
- e. menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan Tercatat terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,
- f. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atas biaya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan.

2.1.2.5 Kepemilikan Manajerial

Permasalahan agensi antara manajer dan *shareholders* timbul karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol. Itulah alasan adanya perbedaan antara manajer dan *shareholders* (Jensen dan Meckling, 1976). Kepemilikan saham oleh manajer dapat meringankan masalah agensi. Selain itu, kepemilikan saham oleh manajer juga akan mengakibatkan keselarasan yang lebih besar pula terhadap kepentingan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dapat terjadi karena beberapa alasan. Misalnya saja saham dimiliki oleh pemilik yang sekaligus menjadi manajer dalam perusahaan tersebut. Selain itu kepemilikan saham oleh manajerial dapat terjadi karena adanya kompensasi atau bonus yang diberikan berupa saham.

Dengan menjadi pemilik saham, para manajer akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Mereka akan membuat keputusan yang terbaik untuk perusahaan. Penelitian sebelumnya atas konsentrasi kepemilikan menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan di Asia Timur termasuk Indonesia ditemukan cenderung terkonsentrasi (Claessens *et al.*, 2000 dalam Wawo, 2010). Kepemilikan saham yang terkonsentrasi biasanya terjadi pada negara yang memiliki tingkat *corporate governance* yang rendah. Yang dimaksud dengan *corporate governance* disini adalah termasuk dewan direksi dan komite audit.

2.1.3 Fraud atau Kecurangan

2.1.3.1 Pengertian Fraud atau Kecurangan

Bologna *et al* (1993 dalam Amrizal 2004) mendefinisikan kecurangan “*Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*” yaitu

kecurangan adalah penipuan kriminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Kriminal disini berarti setiap tindakan kesalahan serius yang dilakukan dengan maksud jahat. Dan dari tindakan jahat tersebut ia memperoleh manfaat dan merugikan korbannya secara financial. Biasanya kecurangan mencakup tiga langkah yaitu (1) tindakan/ *the act.*, (2) Penyembunyian/ *the concealment* dan (3) konversi/ *the conversion*. Pada dasarnya terdapat dua tipe kecurangan, yaitu eksternal dan internal. Kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu perusahaan/entitas, seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan terhadap usaha; wajib pajak terhadap pemerintah. Kecurangan internal adalah tindakan tidak legal

2.1.3.2 Jenis-jenis *Fraud* atau Kecurangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examinations (ACFE,2000)*, terdapat tiga jenis kecurangan yang sering terjadi dalam organisasi. Ketiga jenis itu adalah :

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan. jika salah saji yang terjadi karena ketidaksengajaan, maka kesalahan tersebut bukan menjadi masalah karena akuntan dapat melakukan *re-statement* akun-akun yang mengalami salah saji tersebut.

Yang menjadi masalah adalah jika salah saji tersebut dilakukan secara

sengaja oleh manajemen. Modus ini biasanya dilakukan dengan cara menjual barang lebih banyak, melakukan pembebanan yang lebih sedikit, dan pencatatan persediaan yang tidak sebagaimana mestinya. Hal ini jelas merugikan para investor karena informasi-informasi yang diberikan oleh manajemen menjadi bias.

b. Penyalahgunaan aset (*Asset Misappropriation*)

Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*). Penyalahgunaan aset timbul karena buruknya sistem pengendalian internal di sebuah perusahaan. Agar tujuan perusahaan dapat dicapai, keamanan harta manajemen terjamin dan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien, manajemen perlu menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai. Pengendalian fisik juga dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan aset. Pengendalian fisik meliputi keamanan aset, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang menyangkut aset, serta perhitungan secara periodik aset perusahaan.

c. Korupsi (*Corruption*)

Korupsi adalah perilaku manajemen yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya dirinya sendiri atau pihak lain dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepada mereka. Menurut Myrdal (1987 dalam Revida 2003) memberi saran penanggulangan

korupsi yaitu agar pengaturan dan prosedur untuk keputusan-keputusan administratif yang menyangkut orang perorangan dan perusahaan lebih disederhanakan dan dipertegas, pengadakan pengawasan yang lebih keras, kebijaksanaan pribadi dalam menjalankan kekuasaan hendaknya dikurangi sejauh mungkin, gaji pegawai yang rendah harus dinaikkan dan kedudukan sosial ekonominya diperbaiki, lebih terjamin, satuan-satuan pengamanan termasuk polisi harus diperkuat, hukum pidana dan hukum atas pejabat-pejabat yang korupsi dapat lebih cepat diambil. Orang-orang yang menyogok pejabat-pejabat harus ditindak pula. Menurut *ACFE*, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian illegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic extortion*).

2.1.3.3 Faktor Penyebab Kecurangan

Simanjuntak (2008) mengungkapkan bahwa terdapat empat faktor pemicu kecurangan, yaitu karena keserakahan (*greed*), adanya kesempatan (*opportunity*), karena adanya kebutuhan (*need*), dan yang terakhir adalah karena adanya *exposure* atau pengungkapan.

Faktor keserakahan dan kebutuhan merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan karena kedua hal tersebut dikendalikan oleh diri kita sendiri. Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan.

Menurut Albrecht *et al* (1984 dalam Subramaniam, 2008) kecurangan terjadi jika terdapat tiga hal. Hal ini biasa disebut dengan segitiga kecurangan atau *triangle fraud*. Ketiga elemen tersebut adalah :

1. Adanya tekanan.
2. Adanya kesempatan.
3. Adanya alasan pembenaran.

Faktor tekanan (*pressure*) dapat berasal dari lingkungan kerja dan lingkungan keluarga. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan tekanan (*pressure*) antara lain:

1. Masalah keuangan, seperti tamak/rakus, hidup melebihi kemampuan, banyak hutang, biaya kesehatan yang besar, kebutuhan tak terduga.
2. Sifat buruk, seperti penjudi, peminum, pecandu narkoba.
3. Lingkungan pekerjaannya, misalnya sudah bekerja dengan baik tetapi kurang mendapat perhatian, kondisi kerja yang buruk.
4. Lain-lain seperti tekanan dari lingkungan keluarga.

Adapun faktor-faktor yang dapat meningkatkan adanya peluang atau kesempatan (*opportunity*) seseorang berbuat *fraud* antara lain (Amrizal,2008) :

1. Sistem pengendalian internal yang sering juga disebut pengendalian intern, yang lemah.
2. Tidak mampu menilai kualitas kerja karena tidak punya alat atau kriteria pengukurannya.
3. Kurang atau tidak adanya akses terhadap informasi sehingga tidak memahami keadaan yang sebenarnya.

5. Gagal mendisiplinkan atau memberikan sanksi pada pelaku *fraud*.
6. Lalai, apatis, acuh tak acuh.
7. Kurang atau tidak adanya *audit trail* (jejak audit), sehingga tidak dapat dilakukan penelusuran data.

Dan apabila seseorang telah terbukti melakukan kecurangan, maka dia akan mencari alasan agar ia tidak disalahkan. Hal ini biasa disebut dengan pembenaran atau *rationalization*. Faktor-faktor yang mendorong seseorang mencari pembenaran (*rationalization*) atas tindakannya melakukan *fraud*, antara lain :

1. Mencontoh atasan atau teman sekerja.
2. Merasa sudah berbuat banyak kepada organisasi/perusahaan.
3. Menganggap bahwa yang diambil tidak seberapa.
4. Dianggap hanya sekadar meminjam, pada waktunya akan dikembalikan

2.1.3.4 Pelaku Kecurangan

Menurut Simanjuntak (2008) pelaku kecurangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manajemen dan karyawan/pegawai. Pihak manajemen melakukan kecurangan biasanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu salah saji yang timbul karena kecurangan pelaporan keuangan (*misstatements arising from fraudulent financial reporting*). Sedangkan Karyawan/Pegawai melakukan kecurangan bertujuan untuk keuntungan individu, misalnya salah saji yang berupa penyalahgunaan aktiva (*misstatements arising from misappropriation of assets*).

Kecurangan pelaporan keuangan biasanya dilakukan karena dorongan dan ekspektasi terhadap prestasi kerja manajemen. Salah saji yang timbul karena

kecurangan terhadap pelaporan keuangan lebih dikenal dengan istilah *irregularities* (ketidakberesan). Bentuk kecurangan seperti ini seringkali dinamakan kecurangan manajemen (*management fraud*), misalnya berupa : Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan terhadap catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang merupakan sumber penyajian laporan keuangan. Kesengajaan dalam salah menyajikan atau sengaja menghilangkan (*intentional omissions*) suatu transaksi, kejadian, atau informasi penting dari laporan keuangan.

Kecurangan penyalahgunaan aktiva biasanya disebut kecurangan karyawan (*employee fraud*). Salah satu yang berasal dari penyalahgunaan aktiva meliputi penggelapan aktiva perusahaan yang mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penggelapan aktiva seringkali terjadi jika perusahaan tersebut memiliki pengendalian internal yang lemah. Selain itu, faktor individu pun dapat mempengaruhi misalnya karyawan tersebut sedang menghadapi masalah keuangan. Contoh salah satu jenis ini adalah penggelapan kas, pencurian aktiva perusahaan, *mark up* harga, dan transaksi yang ilegal.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hubungan antara karakteristik komite audit, kepemilikan manajerial, *size*, serta *leverage* yang dilakukan oleh Owen-Jackson *et al* ditahun 2009 menghasilkan kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial dan *size* mempengaruhi terjadi *fraudulent financial reporting*. Mereka termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai hal ini karena melihat besarnya upaya untuk

menumbuhkan kembali kepercayaan investor setelah terjadinya krisis ekonomi dan runtuhnya Enron. Selain itu dari penelitian ini didapatkan bahwa kenyataannya tidak semua perusahaan yang memiliki tata kelola perusahaan yang baik tidak mengalami permasalahan *fraudulent financial reporting*.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Beasley (1996) meneliti mengenai hubungan karakteristik komite audit dengan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah semakin besar proporsi anggota komite audit yang berasal dari luar *board of director* dapat mengurangi terjadinya kecurangan. Selain itu, hasil lain adalah pertemuan yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan.

Penelitian lain oleh Carcello and Nagy (2004) meneliti mengenai perusahaan yang mengalami masalah kecurangan dihubungkan dengan spesialisasi audit. Penelitian ini mengambil sampel perusahaan di Amerika dari tahun 1990-1998. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa spesialisasi industri audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan.

Hasnan et al (2006) menemukan bukti empiris bahwa lingkungan perusahaan menjadi latar belakang terjadinya *fraud*. Contohnya adalah adanya transaksi pada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, tingginya angka pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, tingginya tingkat *financial distress*, dan rendahnya kualitas audit.

Wardhani (2004) dengan menggunakan proksi struktur kepemilikan perusahaan menemukan adanya hubungan yang positif antara *good corporate governance* dan konservatisme akuntansi. Keduanya menunjukkan bahwa struktur

kepemilikan yang terkonsentrasi pada individu tertentu terutama pada manajer mempengaruhi pilihan manajemen terhadap konservatisme akuntansi untuk memaksimalkan kompensasi dengan manajemen laba yang menaik.

Phillip Law (2010) melakukan penelitian mengenai *fraud* di Hongkong. Penemuan dari penelitian itu adalah keefektifan komite audit, keefektifan internal audit, etika manajer, *ethical guidelines* dan *policies* berhubungan positif dengan perusahaan yang tidak mengalami kasus kecurangan.

Benardi dkk (2009) meneliti mengenai hubungan *size*, *leverage*, porsi kepemilikan saham, likuiditas, *profitabilitas*, ukuran KAP, serta skope bisnis dengan luas pengungkapan laporan tahunan menemukan bukti empiris bahwa *size* berpengaruh dengan luas pengungkapan tahunan. Sedangkan tingkat *leverage* menunjukkan tidak berpengaruh dengan luas pengungkapan tahunan.

Suaryana (2005) melakukan penelitian mengenai komite audit independen dan hubungannya terhadap kualitas laba. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ tahun 2001-2002. Dari penelitian itu disimpulkan bahwa pasar menilai laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk komite audit memiliki kualitas yang lebih baik daripada laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak membentuk komite audit.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1.	Owen Jackson <i>et al</i> (2009)	The Association Between Characteristic Committee Audit, Contracting Process and	Dependen: Fraudulent Financial Reporting Independen: Characteristic	<ul style="list-style-type: none"> Komite audit yang memiliki keahlian keuangan, <i>size</i>, dan berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan

		Fraudulent Financial Reporting	Committee Audit, Size, Leverage, Managerial Ownership	keuangan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan
2.	Beasley (1996)	An Empirical Analysis of The Relation Between The Board of The Director Composition and Financial Statement Fraud	Dependen: Fraudulent Financial Reporting Independen: Independensi komite audit,	<ul style="list-style-type: none"> • semakin besar proporsi anggota komite audit yang berasal dari luar <i>board of director</i> dapat mengurangi terjadinya kecurangan • pertemuan yang dilakukan komite audit tidak berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan
3.	Carcello and Nagy (2002)	Auditor Industry Specialitation and Fraudulent Financial Reporting	Dependen: terjadinya kecurangan pelaporan keuangan Independen: Spesialisasi industri auditor	<ul style="list-style-type: none"> • Spesialisasi industri memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan.
4.	Hasnan <i>et al</i> (2006)	Management Predisposition, Motive, Opportunity, and Earnings Management for Fraudulent Financial Reporting in Malaysia	Dependen: terjadinya kecurangan pelaporan keuangan Independen: Motif terjadinya kecurangan (dilihat dari sisi kepemilikan, faktor ekonomi, faktor politik), kecenderungan terjadinya kecurangan (dilihat dari transaksi dengan hubungan istimewa, sejarah terjadinya kecurangan disebabkan	<ul style="list-style-type: none"> • Semakin sedikit transaksi ke pihak istimewa, semakin banyak terjadinya kecurangan dimasa lalu, semakin banyak jumlah pendiri perusahaan maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan kecurangan • perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan asing dan keluarga cenderung melakukan kecurangan • semakin tinggi <i>financial distress</i>, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya kecurangan

			perusahaan, jumlah pendiri perusahaan), kesempatan (buruknya <i>good corporate governance</i>), <i>earning management</i>	
5.	Wardhani	Tingkat Konservatisme Akuntansi di Indonesia dan Hubungannya dengan Karakteristik Dewan sebagai Salah Satu Mekanisme Good Corporate Governance	Dependen: Konservatisme Akuntansi Independen: Keberadaan Komite Audit Kepemilikan saham oleh dewan komisaris, independensi dewan komisaris	<ul style="list-style-type: none"> • komite audit memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat konservatisme dengan menggunakan ukuran akrual • kepemilikan saham oleh dewan komisaris dan independensi komisaris tidak berpengaruh terhadap terjadinya konservatisme dengan menggunakan ukuran akrual
6.	Philip Law (2011)	Corporate Governance and No Fraud Occurance in Organization: Hongkong Evidance	Dependen: tidak terjadinya kecurangan laporan keuangan Independen: keefektifan komite audit, keefektifan auditor internal, etika manajemen, opini auditor tahun lalu, <i>ethics guidelines</i> dan <i>ethics policy</i> , pengalaman auditor eksternal, karakteristik auditor eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • keefektifan komite audit, keefektifan internal audit, etika manajer, <i>ethical guidelines</i> dan <i>policy</i> berhubungan positif dengan perusahaan yang tidak mengalami kecurangan
7.	Benardi dkk (2009)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan dan Implikasinya terhadap Asimetri	Dependen: luas pengungkapan laporan keuangan dan asimetri informasi	<ul style="list-style-type: none"> • ukuran perusahaan, ukuran KAP, skope bisnis berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan

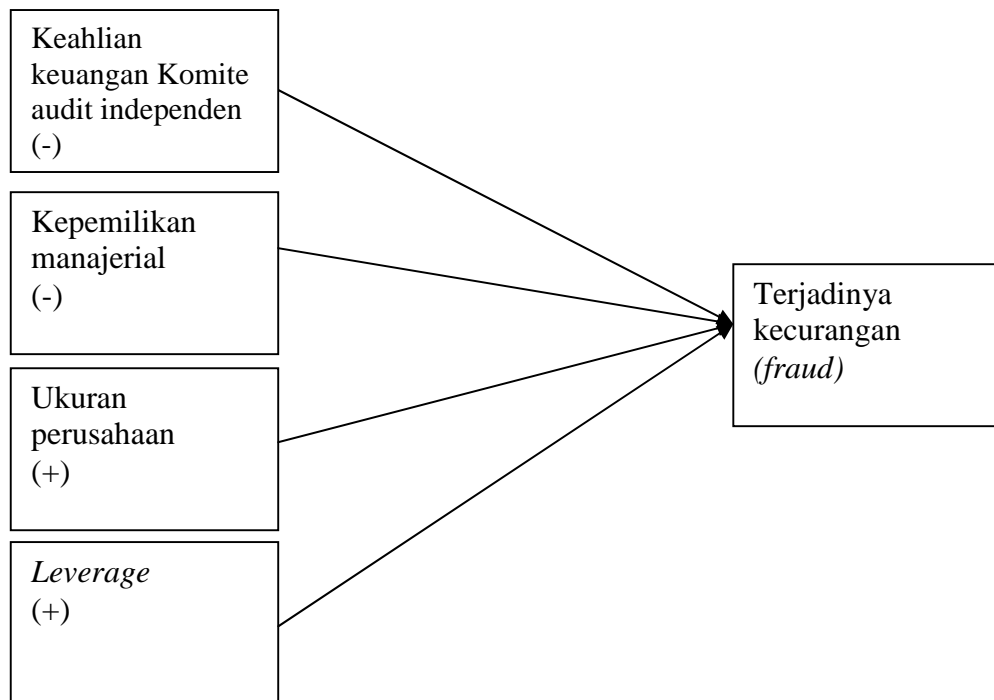
		Informasi	Independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , porsi kepemilikan saham publik, likuiditas perusahaan, profitabilitas perusahaan, ukuran KAP, skope bisnis perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • <i>leverage</i>, kepemilikan saham publik, likuiditas, profitabilitas, tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan laporan tahunan • Luas pengungkapan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terjadinya asimetri informasi
8.	Suaryana (2005)	Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Laba	Dependen: cumulative abnormal return (CAR) Independen: Komite Audit	<ul style="list-style-type: none"> • adanya perbedaan koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit

2.3 Kerangka Pemikiran

Kasus kecurangan akhir-akhir ini sedang marak terjadi. Kehadiran komite audit diharapkan akan meminimalisir terjadinya kasus kecurangan. Dalam *Blue Ribbon Committee* juga memberikan salah satu syarat untuk keanggotaan komite audit yakni salah satu anggota harus seseorang yang ahli dalam bidang keuangan. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan informasi dalam laporan keuangan.

Banyak perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik namun ternyata masih mengalami permasalahan kecurangan oleh pegawainya sendiri. Kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan didalam perusahaan. Dalam teori agensi dinyatakan bahwa terjadi permasalahan antara pihak agen dan *principal*. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan agensi adalah dengan cara memberikan insentif kepada para manajer berupa

kepemilikan saham. Dengan begitu, para manajer akan berusaha untuk menaikkan nilai perusahaan. Selain itu ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan menimbulkan biaya pengendalian yang semakin tinggi.



Gambar 1.1 Model Pemikiran

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan Antara Karakteristik Komite Audit dengan Terjadinya *Fraudulent Financial Reporting*

Hubungan agensi akan terjadi jika *principal* mempekerjakan orang lain, dalam hal ini agen untuk melaksanakan pekerjaan yang telah didelegasikan oleh *principal*. Hubungan agensi dapat menimbulkan beberapa permasalahan karena terjadinya asimetri informasi antara *principal* dan agen. Asimetri informasi inilah

yang dapat menjadi celah terjadinya *fraud*. Untuk mencegah terjadinya *fraud*, dibutuhkan pihak lain yakni komite audit independen. Komite audit sebaiknya memiliki keahlian dalam keuangan. Hal ini dikarenakan keahlian keuangan itulah yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan (Bradbury et al. 2004 dalam Suaryana, 2005). Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal dan auditor internal (Bradbury et al. 2004 dalam Suaryana, 2005). Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Anderson et al. 2003 dalam Suaryana, 2005). Hal-hal itulah yang dapat mengurangi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan di sebuah perusahaan.

Pincus *et al* (1989 dalam Beasley,1996) menulis bahwa komite audit dipandang sebagai mekanisme pemantauan yang secara sukarela bekerja dalam situasi keagenan tinggi untuk meningkatkan kualitas arus informasi. Suaryana (2005) yang meneliti mengenai ERC (*Earning Response Coefficient*) dan Komite audit menghasilkan kesimpulan bahwa terjadi perbedaan signifikan nilai ERC

antara perusahaan yang membentuk komite dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit. Selain itu, Anderson *et al* (2003 dalam Suaryana,2005) menemukan bahwa karakteristik komite audit mempengaruhi kandungan dari informasi laba.

H1: anggota komite audit independen yang ahli dalam bidang keuangan memiliki hubungan yang negatif dengan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.2 Hubungan Antara Kepemilikan Manajerial dengan *Fraudulent Financial Reporting*

Kepemilikan manajerial dianggap dapat mengatasi permasalahan agensi yang selama ini sering terjadi. Karena dengan kepemilikan manajerial, para manajer akan lebih bersemangat dalam meningkatkan nilai perusahaan serta dapat memotivasi manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*. Penemuan empiris oleh Boediono (2005) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap terjadinya manajemen laba. Semakin besar tingkat kepemilikan saham oleh manajerial, maka kemungkinan terjadinya kecurangan pun semakin kecil. Hal ini dikarenakan manajer juga memiliki peran sebagai pemilik saham, oleh karena itu ia akan bekerja sesuai dengan kepentingan *principal*.

H2: kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.3 Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Dengan *Fraudulent Financial Reporting*

Semakin besar ukuran perusahaan (*size*) maka akan menaikkan biaya *agency*. Peningkatan biaya agensi dikarenakan meningkatnya kebutuhan untuk pemantauan dan mekanisme pengendalian (Fama dan Jensen, 1983). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin banyak transaksi yang dilakukan. Dari transaksi inilah kemungkinan kecurangan terjadi. Biaya untuk melakukan pengawasan pada perusahaan besar akan lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan skala kecil ataupun menengah. Moses (1987 dalam Suwito dkk 2005) menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang ketat dari pemerintah dan masyarakat umum). Owen-Jackson *et al* (2009) juga menemukan bukti empiris bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan yang positif dengan terjadinya kecurangan.

H3: ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

2.4.4 Hubungan Antara *Leverage* dengan *Fraudulent Financial Reporting*

Leverage merupakan seberapa besar pinjaman yang atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat *leverage*, maka perusahaan akan cenderung melaporkan *profitabilitas* yang tinggi pula. Disamping itu, semakin tinggi tingkat *leverage* semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar

perjanjian kredit sehingga perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba yang tinggi pula. Hal inilah yang dapat mendorong terjadinya *fraud* pada laporan keuangan. Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa terdapat potensi untuk mentransfer kekayaan dari *debtholders* kepada pemegang saham dan manajer pada perusahaan yang memiliki tingkat ketergantungan hutang yang tinggi. Qiang (2003) menyatakan bahwa *leverage* merupakan proksi kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian kredit. Chen dan Steiner (1999 dalam Nasir & Putri 2006) menghasilkan kesimpulan bahwa peningkatan hutang akan meningkatkan *financial distress* dan kebangkrutan sehingga kebijakan hutang berhubungan positif terhadap resiko. Penelitian lain oleh Zuhroh (1996 dalam Herawaty & Suwito, 2005) menyatakan bahwa hanya *leverage* operasi perusahaan saja yang memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan di Indonesia.

H4: tingkat *leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap terjadinya kecurangan pelaporan keuangan.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Terikat

Terjadinya Kecurangan Pelaporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)

Kecurangan adalah penipuan yang sifatnya kriminal dan bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Perusahaan dikatakan melakukan kecurangan apabila melakukan transaksi yang mengandung unsur salah saji laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi (co: suap dan pemberian illegal). Dalam Undang-Undang, hal itu diatur dalam Undang-Undang no. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perusahaan yang terbukti melakukan *fraud* akan diberi *skor* 1 dan yang tidak terbukti melakukan *fraud* akan diberi *skor* 0.

3.1.2 Variabel Bebas

1. *Financial expertise* anggota Komite Audit

Menurut Keputusan Bapepam no.IX 1.5 tahun 2004, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Di Indonesia, setidaknya terdapat satu anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi. Mengacu pada penelitian Purwati (2006), variabel ini diukur dari prosentase anggota komite audit yang kompeten di bidang keuangan dengan jumlah anggota komite audit. Kompetensi

keuangan dilihat dari apakah anggota komite audit tersebut memiliki gelar Sarjana Ekonomi atau tidak.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajer. Dalam penelitian ini, kepemilikan saham oleh manajer dihitung dengan cara menjumlahkan berapa persen saham yang dimiliki oleh jajaran direksi perusahaan.

3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset, nilai pasar saham, dan lain-lain (Herawaty & Suwito, 2005). Mengacu pada penelitian Owen-Jackson (2009), ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan nilai *LN (logaritma natural) total asset* yang dimiliki perusahaan.

4. *Leverage*

Leverage merupakan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai operasinya. *Leverage* merupakan rasio yang menggambarkan hutang. *Leverage* diukur dengan membandingkan total hutang dengan total aset.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hal ini dikarenakan perbedaan dalam analisis kinerja keuangan oleh karena itu dikhawatirkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan aktifitas yang cenderung terfokus

pada bidang keuangan sehingga diindikasikan akan memiliki kinerja keuangan yang berbeda dengan perusahaan non-keuangan. Sampel dipilih melalui metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu:

1. Perusahaan bidang non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 2002-2006. Data yang digunakan hanya tahun 2002-2006 karena keterbatasan data. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) hanya mengungkapkan perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan *fraud* hanya sampai tahun 2006 saja.
2. Perusahaan yang terkena sanksi Bapepam LK dan sanksi tersebut mengandung unsur *fraud*. Perusahaan dalam kategori ini dapat dilihat pada *annual report* Bapepam. Pada *annual report* Bapepam, terdapat bagian tinjauan operasional yang didalamnya terbagi menjadi beberapa bagian dan salah satu bagian tersebut adalah perundang-undangan, bantuan hukum, dan *litigasi*. Pada bagian itulah terdapat daftar perusahaan yang terkena sanksi oleh Bapepam. Contohnya adalah terjadi manipulasi perdagangan saham dan salah saji laporan keuangan.
3. Perusahaan memiliki data yang lengkap pada tahun 2002-2006

Selanjutnya sampel diambil secara berpasangan antara perusahaan yang melakukan kecurangan pelaporan keuangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Model ini telah digunakan oleh Owen-Jackson *et al* (2009). Kriteria pengambilan sampel ini adalah :

1. Bergerak dalam industri yang sama dengan perusahaan yang mengalami kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketimpangan data
2. Memiliki periode waktu yang sama dengan perusahaan yang mengalami kecurangan. Hal ini agar data lebih akurat. Nilai uang yang disajikan akan lebih akurat jika dibandingkan dalam tahun yang sama.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa laporan tahunan Bapepam yang didapat dari situs resmi Bapepam (<http://www.bapepam.go.id>) serta laporan tahunan atau *annual report* tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada (<http://www.jsx.co.id>) dan sekarang berubah menjadi <http://www.idx.co.id>), *data base* pasar modal pojok BEI Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNDIP Semarang, dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan periode 2002-2006.

3.5 Metode Analisis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logistik. Model ini dipilih dengan alasan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *non metrik*

pada variabel dependen, sedangkan variabel independen variabel *data metric dan non metrik*. Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik dan tidak membutuhkan asumsi normalitas data pada variabel independennya. Analisis *logit* digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang mencerminkan dua pilihan atau sering disebut *binary logistic regression* (Ghozali, 2006). Adapun model regresi logistik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Fraud} = a + b_1 \text{ExpAud} + b_2 \text{ManOwn} + b_3 \text{size} + b_4 \text{Lev} + e$$

Dimana :

Fraud : variabel *dummy*, perusahaan yang melakukan *fraudulent financial reporting* (nilai 1) dan yang tidak (nilai 0)

a : konstanta

ExpAud : proporsi anggota komite audit yang ahli dalam bidang keuangan

ManOwn : kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan berapa persen saham yang dimiliki oleh manajer

Size : ukuran perusahaan yang diproksikan dengan aset perusahaan

Lev : *leverage* yang diproksikan dengan DAR.

Selanjutnya, berdasarkan hasil *output* SPSS yang diperoleh, akan dilakukan analisis pengujian model regresi logistik melalui beberapa tahapan.

Tahapan-tahapan tersebut antara lain :

1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali,2006). Antar variabel independen dalam sebuah model regresi sebaiknya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak *orthogonal*. Variabel *orthogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0.9) maka hal tersebut menjadi indikasi adanya multikolinearitas.
- c. Selain itu dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya.

2. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, *kurtosis*, dan *skewnes* (Ghozali,2006).

3. Menilai Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Langkah pertama adalah menilai *overall fit model* terhadap data. Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah (Ghozali,2006) :

H₀ : Model yang dihipotesiskan *fit* dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak *fit* dengan data

Dari hipotesis ini jelas bahwa kita tidak akan menolak hipotesis nol agar model *fit* dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood*. *Likelihood* L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$. Penurunan *likelihood* ($-2\text{Log}L$) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskam *fit* dengan data.

4. Menilai Kelayakan Model Regresi (*Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*)

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*. *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika

nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test* sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *Goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness -of-fit* lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (Ghozali,2006).

5. Koefisien Determinasi (*Cox and Snell R Square* dan *Nagelkerke R Square*)

Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R Square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai R^2 pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R Square*. *Nagelkerke's R Square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R Square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R Square* dengan nilai maksimumnya (Ghozali, 2006). Nilai yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

6. Menguji Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mampu mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%.